

TESIS

ANALISIS PENGARUH TINGKAT AKSESIBILITAS WILAYAH TERHADAP PERKEMBANGAN KECAMATAN DI KABUPATEN PINRANG

ANALYSIS OF REGIONAL ACCESSIBILITY EFFECTS ON SUB-DISTRICT DEVELOPMENT IN PINRANG REGENCY

Oleh:

A.ANNA RAHAYU

P022181046



PROGRAM STUDI

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



**ANALISIS PENGARUH TINGKAT AKSESIBILITAS WILAYAH
TERHADAP PERKEMBANGAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PINRANG**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**

Disusun dan diajukan oleh

**A.ANNA RAHAYU
P022181046**

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



TESIS

ANALISIS PENGARUH AKSESIBILITAS WILAYAH TERHADAP PERKEMBANGAN KECAMATAN DI KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

A. ANNA RAHAYU
Nomor Pokok P022181046

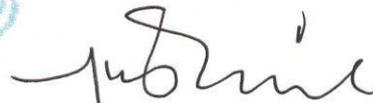
telah di pertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 24 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,



Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, M.S
Ketua



Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : **A. ANNA RAHAYU**
Nomor Mahasiswa : **P022181046**
Program Studi : **Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 6 April 2020



A. ANNA RAHAYU



PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Sang Maha sempurna, pemilik kehidupan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan judul : **“Analisis Pengaruh Tingkat Aksesibilitas Wilayah Terhadap Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Pinrang”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister pada Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin.

Tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair,MS. selaku pembimbing I dan Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan dan waktu yang diberikan kepada penulis tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penguji yakni Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA.,Ph.D., Dr. A.Nixia Tenriawaru, SP,M.Si., Dr.Kurniaty,SE.,M.Si., atas saran, masukan dan kritiknya dalam setiap kesempatan seminar hingga ujian akhir magister.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pusbindiklatren BAPPENAS atas kepercayaan yang diberikan berupa beasiswa melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terima Kasih juga kepada tah Kabupaten Pinrang atas dukungannya dan telah banyak itu dalam pengumpulan data dan informasi terkait penelitian ini.



Kasih juga kepada Bapak Dekan Pascasarjana UNHAS beserta staf

atas dukungan dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, BAPPENAS Angkatan 2018 atas dukungan, semangat, bantuan dan kebersamaan yang tercipta. Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua Ir.H.Ahmad Made Ali,MP dan almh. IPTU Hj. A. Maidah Rahman beserta kedua anaku tercinta Andi Ibnu Dzaky dan Andi Aqila Adzkia.

Tesis ini tentu masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan penulis, penulis berharap semoga penelitian yang telah penulis lakukan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya dan semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Wassalam.

Makassar, 6 April 2020

A.ANNA RAHAYU



ABSTRAK

A. ANNA RAHAYU. *Analisis Pengaruh Tingkat Aksesibilitas Wilayah terhadap Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Hazairin Zubair dan Mahyuddin).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat aksesibilitas wilayah terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang. Dalam perkembangan wilayah ada dua variabel yang dapat dilihat, yakni pertama, aksesibilitas wilayah dengan indikator luas wilayah dan jaringan jalan dan kedua, wilayah dengan indikator sosial ekonomi berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan, kemudian indikator kependudukan yang berupa jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan aktivitas penduduk. Tujuan selanjutnya adalah melihat apakah indikator aksesibilitas wilayah dan indikator perkembangan wilayah memiliki korelasi yang signifikan terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dan pengumpulan dokumen serta informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Pinrang tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi $p=0,006$ ($<0,01$) yang menunjukkan bahwa hubungan antara aksesibilitas wilayah (indeks alpha) dan perkembangan wilayah (nilai skalogram) signifikan pada level signifikansi 1%. Nilai r pada penelitian ini, yaitu 0,74 (berada di antara 0,50 – 0,75). Artinya, hubungan korelasinya kuat. Hasil lain menunjukkan hubungan yang searah karena keduanya menghasilkan angka (+). Artinya, jika indeks alphanya naik, nilai skalogramnya juga akan meningkat. Begitu pun sebaliknya sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas wilayah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang. Semakin tinggi aksesibilitas wilayah di suatu kecamatan di Kabupaten Pinrang, maka semakin tinggi pula tingkat perkembangan wilayahnya, begitu pun sebaliknya.

Kata kunci: aksesibilitas, perkembangan wilayah, indeks alpha, skalogram



ABSTRACT

A. ANNA RAHAYU, *An Analysis of Regional Accessibility Effects on Subdistrict Development in Pinrang Regency*, (supervised by **Hazairin Zubair** and **Mahyuddin**).

This study aims to analyze the effect of the level of regional accessibility on the development of districts in Pinrang Regency. In regional development there are two variables that can be seen first Accessibility of the region with indicators of the area and road network. Second, the development of the region with socio-economic indicators in the form of educational facilities, health facilities and worship facilities, then population indicators in the form of population density and population activities. And then, to see whether the indicators of regional accessibility and regional development indicators have significant correlations to the development of districts in Pinrang Regency.

The method used is quantitative descriptive using secondary data. This secondary data were obtained from literature study and collection of documents and information from the Central Statistics Agency (BPS) in Pinrang Regency in 2019.

The results of this study indicate that the P-Value significance value of 0.006 ($s < 0,01$) indicates that the relationship between regional accessibility (alpha index) and regional development (scalogram value) is significant at the 1 % significance level. The value of r in this study is 0.74, between 0.50 to 0.75 it means that their relationship is strong. This data shows a unidirectional relationship because both of them produce numbers (+) meaning that if the alphabet index rises, the value of the scalogram will also increase and vice versa. So it can be concluded that the accessibility of the region is very influential on the development of districts in Pinrang Regency. The higher the accessibility of the area the higher the level of regional development and vice versa.

Keywords : Accessibility, Regional development, Index Alpha, Scologram



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
1 Pendahuluan.....	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	22
2 TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Konsep Wilayah	24
B. Konsep Aksesibilitas Wilayah.....	28
C. Konsep Perkembangan Wilayah	34
D. Indikator Perkembangan Wilayah	35
1. Indikator Sosial Ekonomi	36
2. Indikator Kependudukan.....	37
3. Indikator Aksesibilitas Wilayah	38
penelitian terdahulu yang relevan	39
kerangka Konseptual.....	41



3 METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Variabel Penelitian	43
E. Analisis Data	45
1. Indeks Aksesibilitas	45
2. Indeks Alpha	46
3. Indeks Perkembangan Wilayah	47
4. Metode Location Quotient (LQ)	47
5. Analisis Skalogram	48
6. Analisis Korelasi	50
F. Matriks Penelitian	52
4 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum	54
1. Luas dan Batas Administrasi	54
2. Topografi	56
3. Demografi	59
4. Sarana dan Prasarana Wilayah	61
B. HASIL PENELITIAN	71
1. Perhitungan Nilai Aksesibilitas Wilayah	71
2. Perhitungan Nilai Perkembangan Wilayah	77
3. Faktor Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pinrang	86
4. Faktor Perkembangan Wilayah di Kabupaten Pinrang	89
5. Hasil Perhitungan Hubungan Korelasi	94



5 KESIMPULAN DAN SARAN..... 98

 A. Kesimpulan 98

 B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA..... 101



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Aksesibilitas.....	30
Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3. Indikator Terpilih dari Kajian Teori Aksesibilitas Perkembangan Wilayah.....	43
Tabel 4. Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan.....	54
Tabel 5. Jumlah Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan	55
Tabel 6. Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2018.....	57
Tabel 7. Keadaan Wilayah Berdasarkan Kelerengan	59
Tabel 8. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	60
Tabel 9. Panjang dan Jenis Permukaan Jalan.....	62
Tabel 10. Sarana Kesehatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2018.....	64
Tabel 11. Sarana Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2018	65
Tabel 12. Indikator Pendidikan Kabupaten Pinrang Tahun 2018.....	66
Tabel 13. Sarana Perdagangan di Kabupaten Pinrang Tahun 2018.....	67
Tabel 14. Sarana Perindustrian di Kabupaten Pinrang Tahun 2018	69
Tabel 15. Sarana Peribadatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2018.....	71
Tabel 16. Nilai Range Indeks Aksesibilitas Wilayah.....	73
Tabel 17. Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pinrang.....	74
Tabel 18. Hasil Analisis Skalogram Fasilitas Ekonomi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pinrang tahun 2018	77
Tabel 19. Hasil Analisis Skalogram Fasilitas Sosial Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pinrang tahun 2018	79
Tabel 20. Hasil Analisis Skalogram Fasilitas Pemerintahan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2018	80



Tabel 21. Hasil Analisis Skalogram Di Kabupaten Pinrang Tahun 2018.....	82
Tabel 22. Nilai Range Skalogram	83
Tabel 23. Hasil Klasifikasi Range Nilai Skalogram Perkecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2018	83
Tabel 24. Perkembangan PDRB Kabupaten Pinrang	89
Tabel 25. Statistik Ketenagakerjaan di Kabupaten Pinrang	89
Tabel 26. Indikator IPM di Kabupaten Pinrang	91
Tabel 27. Hasil Indeks Alpha dan Skalogram	95
Tabel 28. Perhitungan Korelasi dengan Menggunakan SPSS.....	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan (2014-2018)	20
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Pinrang.....	42
Gambar 3. Peta Topografi Kabupaten Pinrang	56
Gambar 4. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2018.....	59
Gambar 5. Peta Ruas Jalan Kabupaten Pinrang	61
Gambar 6. Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan	63
Gambar 7. Peta Persebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Pinrang.....	65
Gambar 8. Peta Persebaran Sarana Perdagangan di Kabupaten Pinrang..	68
Gambar 9. Peta Persebaran Sarana Perindustrian di Kabupaten Pinrang ..	70
Gambar 10. Peta Persebaran Sarana Peribadatan di Kabupaten Pinrang ..	70
Gambar 11. Peta Administrasi Kabupaten Pinrang Tahun 2018	72
Gambar 12. Peta Klasifikasi Indeks Alpha di Kabupaten Pinrang Tahun 2018.....	75
Gambar 13. Peta Klasifikasi Nilai Skalogram Perkembangan Kecamatan ..	84
Gambar 14. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pinrang	91



BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan pada saat ini luar biasa maju. Hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi di dunia sehingga jarak antar kota, pulau, negara bahkan dunia seakan tiada lagi. Saat ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada, manusia bisa berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dari seluruh penjuru dunia. Dengan berkembangnya teknologi transportasi dan komunikasi maka dunia seakan berada di depan mata sehingga jarak, ruang dan waktu semakin relatif dan mudah untuk diakses.

Hal ini bisa menimbulkan persaingan global dan perdagangan bebas yang akan berpengaruh pada perekonomian dunia dan pembangunan nasional yang akan datang. Perekonomian nasional akan menjadi lebih terbuka dan akan langsung berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan juga pembangunan di setiap daerah. Keadaan ini membuat setiap daerah di Indonesia harus siap menghadapi gejolak yang ditimbulkan oleh perkembangan pembangunan yang begitu pesat ini.

Dengan adanya perkembangan ini maka Pemerintah Indonesia akan berbagai usaha agar daerah – daerah yang berada di sana dapat mempersiapkan diri menghadapi persaingan global dan perdagangan bebas. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah



Indonesia adalah dengan menetapkan 4 (empat) Pilar Pembangunan Indonesia 2014-5 yang menjadi acuan dalam mencapai kemajuan pembangunan jangka panjang nasional Indonesia, yaitu : 1). Pengembangan Manusia dan Penguasaan Sains dan Teknologi, 2). Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan, 3). Pemerataan Pembangunan, dan 4). Memperkuat Ketahanan dan Pemerintahan Nasional, (RPJP, Bappenas, 2018).

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerataan hasil pembangunan, perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perkembangan wilayah dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai dengan pemerataan pembangunan bisa menciptakan perekonomian yang lemah dengan eksploitasi sumber daya manusia yang cukup besar. Sehingga dibutuhkan keselarasan dan keseimbangan laju pertumbuhan antar wilayah agar tercipta pembangunan yang merata dan berkelanjutan (*sustainable*).

Perkembangan pembangunan di daerah tertuang dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan revisinya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 bahwa setiap wilayah diberikan wewenang untuk mengembangkan daerah serta menggali sendiri potensi yang ada di daerahnya. Dengan adanya undang - undang ini maka

an pembangunan di setiap daerah dapat tepat sasaran.



Salah satu faktor utama dalam menentukan perkembangan wilayah adalah ketersediaan infrastruktur seperti sarana dan prasarana serta sistem jaringan jalan. Dengan adanya sistem jaringan jalan dalam suatu wilayah membuat interaksi dan mobilitas antar masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mempengaruhi nilai aksesibilitas dalam wilayah tersebut. Dimana aksesibilitas yang dimaksud disini adalah suatu keadaan atau kemampuan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung maupun tidak langsung. (Sumadi,dkk 2015).

Kabupaten Pinrang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 1.961,77 Km² yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan merupakan wilayah yang cukup luas dengan wilayah pesisir seluas 1.457,19 Km² dan garis pantai yang cukup panjang yakni sekitar 101 km membuat potensi sumber daya alam di Kabupaten Pinrang cukup baik dikembangkan bagi kesejahteraan rakyat. Salah satu yang menarik dari Kabupaten Pinrang adalah karena kabupaten ini memiliki dataran tinggi dan dataran rendah yang sangat baik bagi perkembangan komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Ditunjang dengan sumber daya air yang melimpah dan curah hujan yang cukup tinggi membuat Kabupaten Pinrang menjadi salah satu sentra pengembangan agroindustri di Provinsi Sulawesi Selatan.

Akan tetapi dengan kondisi wilayah Kabupaten Pinrang yang sangat



dengan topografi yang berbeda dan keberagaman sumberdaya alam sumberdaya manusia seperti ini bisa menimbulkan

ketidakseimbangan dan kesenjangan perkembangan wilayah antar kecamatan.

Di Kabupaten Pinrang misalnya ada beberapa desa di kecamatan yang jaraknya jauh dari ibu kota kabupaten seperti salah satu desa di Kecamatan Batulappa yang berjarak 25 km dari ibu kota kabupaten dan beberapa desa di Kecamatan Lembang yang jarak antara ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan mencapai 35 km bahkan lebih untuk beberapa desanya sehingga akses yang berhubungan dengan ibu kota kabupaten sangatlah jauh. Bahkan di kecamatan ini ada beberapa desa yang jalannya hanya bisa diakses dengan kendaraan roda dua karena kondisi topografinya yang berada diatas gunung dimana ketinggian wilayahnya berada diantara 2 – 1.908 mdpl untuk Kecamatan Lembang dan 20 – 1.007 mdpl untuk Kecamatan Batulappa. Padahal kecamatan tersebut memiliki potensi lahan dan sumber daya alam yang sangat besar khususnya di bidang pertanian dan perkebunan.

Dengan kondisi daerah seperti ini yaitu ada beberapa kecamatan yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten membuat Pemerintah Kabupaten Pinrang menyiapkan segala sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan dan perkembangan pembangunan dikecamatan tersebut seperti pembangunan fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan. Dengan adanya pembangunan di daerah

diharapkan agar akses masyarakat terhadap segala fasilitas



dapat terpenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Oleh karena itu dalam RPJMD 2014 – 2019 Kabupaten Pinrang, arah pembangunan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang secara umum diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah serta meningkatkan intensitas dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah. Sehingga pengembangan pembangunannya perlu didukung oleh berbagai sistem prasarana wilayah yang terhubung secara nasional dan regional.

Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan pengembangan serta potensi yang ada di daerah tersebut. Sistem ini sangat diperlukan oleh daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas wilayah, khususnya antar pusat kegiatan dengan wilayah pendukungnya sehingga aktivitas ekonomi di masing - masing satuan wilayah dapat berkembang dan saling menopang satu sama lain.

Adanya sinergitas antara pusat wilayah dengan wilayah penopang atau hinterland seperti hubungan antara kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan wilayah potensial mampu mendorong interaksi simbiosis mutualistik antar pusat pertumbuhan. Sehingga terdapat dua pola dalam



ibangkan sistem sarana dan prasarana wilayah yang mampu mengubah struktur ruang dalam jangka panjang, yaitu : *pertama*;

peningkatan sarana dan prasarana wilayah untuk menjalani tingkat kebutuhan saat ini, dan *kedua*; peningkatan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Pinrang melalui peningkatan aksesibilitas antar kawasan perkotaan dan pedesaan maupun antar pusat – pusat kegiatan wilayah. (RPJMD 2014 – 2019).

Sesuai dengan RPJMD 2014 – 2019 Kabupaten Pinrang, yaitu perkembangan pembangunan wilayah yang bersinergi secara lokal, regional dan nasional diarahkan untuk mencapai sistem jaringan prasarana wilayah dengan perencanaan sistem transportasi. Secara lokal, arahan perencanaan sistem transportasi adalah sebagai berikut :

1. Mengatasi masalah pada sistem pergerakan dan kegiatan masyarakat, terutama mengenai kemacetan yang sering terjadi pada titik simpul jalan.
2. Membenahi sistem jaringan jalan dan sistem pergerakan masyarakat untuk memperlancar aksesibilitas antar kecamatan di Kabupaten Pinrang.
3. Mengantisipasi *travel demand* akibat penambahan jumlah penduduk dan faktor lainnya melalui pengembangan kuantitas dan kualitas jalan.
4. Mendukung peningkatan produksi pertanian pada wilayah yang memiliki sumber daya alam yang potensial di daerah pedesaan dan menyiapkan prasarana jalan yang memadai.



Kemudian pada sistem transportasi regional diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mengantisipasi penambahan travel demand pada perbatasan antar kota atau kabupaten dengan memperhatikan rute atau trayek moda angkutan umum.
2. Meningkatkan kelancaran arus dan distribusi barang dan jasa dengan membenahan struktur dan fungsi jaringan jalan sesuai dengan rencana struktur pusat permukiman dan pelayanan. Hal ini bisa dicapai dengan perencanaan prasarana transportasi meliputi kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal kargo.

Dan yang terakhir, keterikatan dengan system transportasi nasional diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

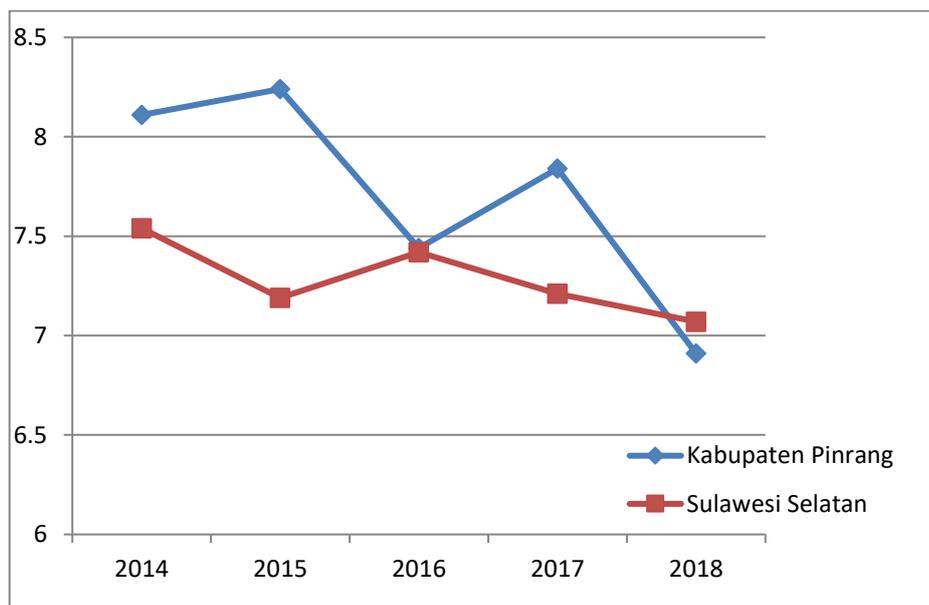
1. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat pada jaringan jalan arteri atau primer dengan memanfaatkan peluang pergerakan masyarakat yang tinggi pada kawasan tersebut.
2. Peningkatan aksesibilitas wilayah dengan pusat kota pinrang dengan wilayah sekitarnya terutama pusat perkotaan.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sangat fluktuatif dimana pada tahun 2014 tumbuh sebesar 8,11%, lalu pada tahun 2015 naik sebesar 8,24%, kemudian pada tahun 2016 turun sebesar 7,44%, dan ditahun



naik lagi sebesar 7,84% kemudian pada tahun 2018 turun lagi 6,91%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang

adalah 6.51% sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang hanya mencapai 7,28%. Dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 7,54%, 7,19%, 7,42%, 7,21% dan 7,07% seperti pada grafik di bawah ini.



Gambar 1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan (2014-2018)
Sumber : Pinrang dalam angka 2019

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis dan naik lagi di tahun 2017 melebihi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan walaupun turun lagi di tahun 2018. Hal ini didukung oleh sumberdaya dan

li masyarakat yang relatif besar. Oleh karena itu jika segala aksesibilitas di Kabupaten Pinrang dapat diatasi dengan baik



bukan tidak mungkin Kabupaten Pinrang bisa menjadi salah satu kabupaten yang terdepan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berangkat dari fenomena tersebut membuat perkembangan wilayah di Kabupaten Pinrang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dengan harapan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu saran strategi kebijakan kepada pemerintah untuk menanggulangi tingkat pengaruh aksesibilitas terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pinrang sehingga pembangunan dapat berlangsung secara adil, merata dan berkelanjutan (*Sustainable*).

B. Rumusan Masalah

Pembangunan suatu wilayah dapat berkembang cepat apabila aksesibilitas wilayah di daerah tersebut baik sehingga dapat menunjang perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut dapat diteliti bahwa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat aksesibilitas tiap kecamatan di Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana perkembangan wilayah di setiap kecamatan di Kabupaten Pinrang ?

Bagaimana pengaruh tingkat aksesibilitas wilayah terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat aksesibilitas wilayah terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang dilihat dari sudut pandang geografis, sosial, ekonomi serta perencanaan kota.

1. Menentukan tingkat aksesibilitas tiap kecamatan di Kabupaten Pinrang
2. Menganalisis perkembangan wilayah disetiap kecamatan di kabupaten Pinrang.
3. Menetapkan pengaruh tingkat aksesibilitas wilayah terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap ilmu pengetahuan maupun sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

1. Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh dan tingkat aksesibilitas wilayah terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.



2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dalam bidang perencanaan pembangunan khususnya dalam menanggulangi kesenjangan aksesibilitas wilayah terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang.



BAB.II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Wilayah

Konsep wilayah tidak di identikkan dengan satu definisi saja melainkan saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai macam aspek tergantung tipe wilayah yang ingin dikaji. Hal ini juga menimbulkan definisi wilayah yang berbeda-beda dari beberapa ahli dengan melihat tipe wilayah, fungsi dan korelasi yang kuat antara unsur fisik dan non fisik pembentuk suatu wilayah tersebut. Sehingga pengertian wilayah tidak hanya sebatas pada aspek fisik semata namun juga sangat berpengaruh pada aspek lain seperti ekonomi, sosial budaya, biologi dan lingkungan (Rahman,2009).

Seperti salah satu definisi yang dikemukakan Rustiadi et al (2007) dalam jurnalnya yang melihat pada aspek fungsional dan geografis mengatakan bahwa wilayah didefinisikan sebagai komponen unit geografis dengan batas – batas spesifik tertentu yang saling berinteraksi satu sama lain secara fungsional. Hal ini juga sejalan dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan revisinya Undang – Undang nomor 25 Tahun 2010 tentang penataan Ruang, bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.



Secara teoritis, hirarki wilayah tidak hanya ditentukan oleh tingkat kapasitas pelayanan dan kapasitas infrastruktur fisik saja tetapi juga kapasitas kelembagaan, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta kapasitas perekonomian lainnya. Kemudian hirarki wilayah yang dilihat secara historis merupakan pertumbuhan suatu wilayah di pusat kota yang ditunjang oleh wilayah pendukung atau hinterland dan dipengaruhi oleh aktivitas sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga hirarki pusat wilayah secara operasional, sangat ditentukan oleh kapasitas pelayanannya. Kapasitas pelayanan (*regional services capacity*) yang dimaksud adalah kapasitas sumberdaya suatu wilayah (*regional resources*), yang mencakup kapasitas sumberdaya alam (*natural resources*), sumberdaya manusia (*human resources*), sumberdaya sosial (*social capital*) dan sumberdaya buatan (*an-made resources / infrastructure*) (Rahman,2009).

Sehingga dalam perhitungan kapasitas pelayanan, sumberdaya yang paling mudah dinilai secara fisik dan operasional adalah sumberdaya buatan (sarana dan prasarana pada pusat – pusat wilayah). Secara sederhana kapasitas pelayanan infrastruktur atau prasarana wilayah dapat diukur dari :

1. Kualitas sarana layanan
2. Jumlah jenis sarana pelayanan yang ada.

Jumlah sarana.



Sedangkan besaran aktivitas sosial ekonomi secara operasional dapat diukur dari :

1. PDRB
2. Jumlah penduduk
3. Perputaran uang
4. Aktivitas ekonomi
5. Jumlah jenis organisasi formal maupun non formal

Banyaknya jumlah sarana pelayanan dan jumlah serta jenis sarana pelayanan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk disuatu wilayah. Sehingga semakin banyak jumlah dan jenis sarana pelayanan dalam suatu daerah maka semakin tinggi pula kapasitas pusat wilayah tersebut. Begitupun dengan tingginya aktivitas sosial ekonomi suatu masyarakat yang berbanding lurus dengan hirarki pusat di suatu daerah. Sehingga pusat wilayah yang berhirarki tinggi sebaiknya menopang kapasitas pelayanan wilayah yang berhirarki (*Rustiadi et al,2007*).

Berdasarkan konsep wilayah pusat dan daerah sekitarnya (*hinterland*) suatu wilayah ditentukan oleh kelengkapan fungsi pelayanan suatu daerah sehingga pusat wilayah yang memiliki jumlah penduduk, industry dan fasilitas umum dengan kuantitas dan kualitas yang relatif lebih lengkap memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pusat pelayanan terhadap daerah hinterland.



tempat terkonsentrasinya pemukiman penduduk
 dasar bagi komoditas pertanian maupun industri.

4. Lokasi tempat pemusatan industri manufaktur yaitu suatu kegiatan yang mengkoordinasikan faktor produksi untuk menghasilkan output tertentu.

Sebaliknya wilayah hinterland merupakan wilayah pendukung atau penopang pusat kota yang memiliki kapasitas pelayanan dan jumlah penduduk dengan kuantitas dan kualitas yang relatif rendah dari wilayah lain terutama pusat kota. Wilayah *hinterland* berfungsi sebagai :

1. Penjaga keseimbangan ekologis.
2. Pemasok tenaga kerja
3. Daerah pemasaran barang dan jasa
4. Produsen bahan mentah dan bahan baku.

Dari berbagai macam aspek yang telah dijabarkan diatas untuk mendefinisikan konsep wilayah maka hirarki wilayah berfungsi untuk menentukan fasilitas apa yang perlu dibangun diwilayah tersebut. Fasilitas kepentingan umum tidak hanya menyangkut jenisnya tetapi juga kapasitas dan kualitas pelayanan. Dalam suatu wilayah biasanya mempunyai semua jenis fasilitas, tetapi kapasitas dan kualitas pelayanannya berbeda. Makin maju suatu wilayah maka semakin beragam pula fasilitas yang disediakan. (Tarigan, 2006).

Untuk mengidentifikasi pusat wilayah ada beberapa teknik dan metode sederhana yang dapat dilakukan seperti menggunakan metode

m metode sosiogram dan metode biseksi. Dengan metode semua nama pusat wilayah, jumlah penduduk, jumlah jenis dan



sarana pelayanan dapat dilihat dengan cara mencatat semua fasilitas pelayanan dalam suatu wilayah kedalam matriks yang akan dikonversi dengan angka untuk melihat tingkatan perkembangan pembangunan pada wilayah tersebut. (*Rustiadi dalam rahman,2009*).

B. Konsep Aksesibilitas Wilayah

Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan meliputi waktu, biaya dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat atau kawasan dari suatu sistem (*Ode et al. 2004*) sedangkan menurut Black (1981) aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi untuk berinteraksi satu sama lain yang dicapai melalui transportasi. (*Parlindungan,2010*)

Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan kegiatan. Salah satu variabel yang dapat menyatakan tinggi rendahnya suatu aksesibilitas wilayah dalam suatu daerah adalah dengan melihat banyaknya sistem jaringan jalan yang tersedia pada daerah tersebut. (*Sumadi, dkk 2015*)

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya aksesibilitas salah satunya adalah topografi, karena dapat menjadi penghambat bagi interaksi di suatu daerah. Jadi tinggi rendahnya aksesibilitas sangat tergantung pada morfologi, topografi, dan laut juga sistem



jaringan serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar berbagai hubungan antara daerah sekitarnya. Keadaan hidrologi seperti sungai, danau, rawa, dan laut juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan pertanian, perikanan, perhubungan, perindustrian, kepariwisataan sehingga tentu saja dapat juga mempengaruhi aksesibilitas wilayah pada daerah tersebut. (*Sumaatmadja, dalam parlindungan 2010*).

Dengan adanya aksesibilitas ini diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas, baik itu berhubungan dengan mobilitas fisik, seperti akses jalan raya, gedung perkantoran, pertokoan, sekolah, pusat kebudayaan, lokasi industri, rekreasi dan beberapa fasilitas lainnya maupun aktivitas non fisik seperti kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendidikan, mengakses informasi, mendapat perlindungan dan jaminan hukum. (*Kartono, 2001*).

Menurut La ode dalam jurnalnya mengatakan bahwa aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara gerografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan “mudah” atau “susah”nya lokasi tersebut dicapai melalau sistem jaringan transportasi (*Ode et al. 2004*)



ndapat Black mengenai “mudah” atau “susah” dalam konsep litas wilayah merupakan hal yang sangat “subjektif” dan

“kualitatif”. Mudah bagi seseorang belum tentu mudah bagi orang lain, begitupun sebaliknya. sehingga diperlukan suatu hal yang terukur (kuantitatif) yang dapat menyatakan aksesibilitas atau kemudahan.

Dalam bukunya Miro menjelaskan bahwa tingkat aksesibilitas wilayah dapat diukur berdasarkan beberapa variabel yaitu ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang, lebar jalan dan kualitas jalan. Selain itu pola pengaturan tata guna lahan dan pola pengaturan fasilitas umum juga sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat aksesibilitas wilayah. Perbedaan geografis, jenis dan intensitas kegiatan dalam suatu daerah juga akan mempengaruhi pola pengaturan fasilitas umum sehingga lebih beragam. Kondisi ini membuat penyebaran lahan dalam suatu wilayah menjadi tidak merata (heterogen) dan faktor jarak bukan satu-satunya elemen yang menentukan tinggi rendahnya tingkat aksesibilitas (Miro, 2004).

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Aksesibilitas

Jarak	Jauh dari Kota Kabupaten	Aksesibilitas Rendah	Aksesibilitas Menengah
	Dekat dari kota kabupaten	Aksesibilitas Menengah	Aksesibilitas Tinggi
Kondisi Prasarana		Sangat Jelek	Sangat Baik

: Black (1981)



Tingkat aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak. Sehingga jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya maka tingkat aksesibilitas wilayahnya juga tinggi. Sebaliknya, jika kedua tempat itu sangat berjauhan, aksesibilitas antara keduanya rendah. Jadi, tata guna lahan yang berbeda pasti mempunyai aksesibilitas yang berbeda pula karena aktivitas tata guna lahan tersebut tersebar dalam ruang secara tidak merata (heterogen).

Akan tetapi, pendapat mengenai tata guna lahan dalam mengukur tingkat aksesibilitas dalam suatu wilayah tidak semuanya bisa digunakan, seperti bandara yang lokasinya memiliki pakem tertentu dan biasanya berada jauh dari kota (karena ada pertimbangan dari segi keamanan, pengembangan wilayah, dan lain-lain). Sehingga pendapat diatas dapat mengatakan bahwa aksesibilitas ke bandara tersebut pasti akan selalu rendah karena letaknya yang jauh di luar kota. Namun, meskipun letaknya jauh, aksesibilitas ke bandara dapat dipastikan bisa ditingkatkan dengan menyediakan sistem jaringan transportasi yang dapat dilalui dengan kecepatan tinggi sehingga waktu tempuhnya menjadi pendek.

Oleh sebab itu, penggunaan “jarak” sebagai ukuran aksesibilitas mulai diragukan orang dan mulai dirasakan bahwa penggunaan “waktu tempuh” merupakan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan “jarak” dalam menyatakan aksesibilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

tempat yang berjarak jauh belum tentu memiliki tingkat aksesibilitas dan tempat yang berjarak dekat mempunyai aksesibilitas tinggi



karena terdapat faktor lain dalam menentukan aksesibilitas yaitu waktu tempuh, kondisi geografis, topografi dan morfologinya.

Wilayah yang terletak pada fokus lalu lintas yang ramai akan mengalami perkembangan yang cepat. Aksesibilitas di wilayah tersebut menjadi semakin besar sehingga membuka kemungkinan terjadinya urbanisasi dan perkembangan wilayah. Jalur jalan dalam wilayah dan jalur-jalur jalan penghubung wilayah dengan daerah disekitarnya sangat berpengaruh dan ikut meningkatkan interaksi arus manusia dan arus barang antar wilayah. (Bintarto, 1989).

Perjalanan lalu lintas barang atau penumpang antara suatu lokasi dengan lokasi lainnya dipengaruhi oleh sistem pola kegiatan tata gubahan seperti sistem kegiatan ekonomi, sosial, kebudayaan dan lainnya. Pembangunan transportasi dapat digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk mengembangkan dan memajukan daerah terpencil agar dapat menjadi maju. Melalui pengembangan sarana ini diharapkan daerah dengan penduduknya akan dapat berkembang. Untuk menembus daerah isolasi atau daerah terpencil di Kabupaten Pinrang yang dapat dilakukan dengan pengembangan prasarana dan sarana transportasi, baik pembangunan jalan baru, maupun perbaikan kondisi jalan yang sudah ada.

Selain indeks aksesibilitas, adanya lahan kosong dan tersedianya lain merupakan unsur daya tarik lain yang harus diperhatikan. Lahan kosong ini oleh Hansen dinamakan *holding capacity*. Gabungan



antara *accessibility index* dengan *holding capacity* adalah potensi pengembangan suatu daerah. Sehingga perlu diingat bahwa ada ketentuan mengenai lahan yang berlaku di Indonesia, misalnya lahan yang kemiringannya di atas 300, daerah rawa-rawa, daerah yang sering terkena banjir, sawah beririgasi teknis, badan jalan, sungai, drainase, dan lahan yang sudah diperuntukan untuk tujuan lain, misalnya perkantoran, kompleks militer, kawasan industri, lapangan olahraga, dan pariwisata harus dikeluarkan dari perhitungan karena tidak sesuai untuk permukiman penduduk.

Beberapa jenis tata guna lahan tersebar secara meluas (perumahan) dan jenis lainnya berkelompok (pusat pertokoan). Ada pula di satu atau dua lokasi saja dalam suatu kota seperti rumah sakit dan bandara. Apabila tata guna lahan saling berdekatan dan hubungan transportasi antar tata guna lahan tersebut mempunyai kondisi baik, maka aksesibilitas tinggi. Sebaliknya jika aktivitas tersebut saling terpisah jauh dan hubungan transportasinya jelek, maka aksesibilitas rendah. Beberapa kombinasi diantaranya mempunyai aksesibilitas menengah.

Dari sisi jaringan transportasi, kualitas pelayanan transportasi pasti juga berbeda-beda. Begitupun dengan sistem jaringan transportasi di suatu daerah mungkin lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Contohnya pelayanan angkutan

iasanya lebih baik di pusat pertokoan dan pada beberapa jalan transportasi dibandingkan dengan di daerah pinggiran kota.



C. Konsep Perkembangan Wilayah

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005), pengembangan wilayah merupakan upaya untuk meningkatkan perkembangan sosial ekonomi, penurunan kesenjangan antar wilayah dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di suatu wilayah. Pengembangan wilayah bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Hal ini diperlukan karena setiap wilayah memiliki kondisi sosial ekonomi, budaya dan keadaan geografis yang berbeda-beda. (Sumadi,dkk 2015)

Suatu wilayah selalu mengalami perkembangan. Salah satu indikator perkembangan wilayah adalah kemudahan. Kemudahan dalam hal ini berkaitan dengan cara masyarakat memperoleh kebutuhan. (Adisasmita 2010 : 276).

Pembangunan suatu wilayah akan lebih berkembang bila memperhatikan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan penduduknya. Seperti jaringan jalan, jaringan informasi dan lainnya. (Yunus,2000).

Pembangunan tidak akan berjalan lancar jika infrastruktur sarana dan prasarana tidak baik. Prasarana (infrastruktur) merupakan hal yang penting dalam meningkatkan perkembangan sosial dan kegiatan ekonomi. Aspek prasarana pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai bidang antara lain, Pendidikan, Kesehatan, Banyaknya Industri, Jenis Perdagangan dan Peribadatan (Sumadi,dkk 2015).



tuk meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu daerah maka mengembangkan sarana dan prasarana yang paling cocok untuk

dikembangkan di daerah tersebut seperti sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi (*Sumaatmadja, 1988*)

Pembangunan di suatu wilayah akan cepat berkembang bila didukung infrastruktur dan sistem jaringan yang memadai di wilayah tersebut. Adapun salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan pembangunan suatu wilayah adalah di bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, industri, perdagangan, aktivitas penduduk (mata pencaharian), lembaga keuangan dan peribadatan.

Untuk mengukur tingkat Perkembangan wilayah dapat diketahui dengan menggunakan teknik analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan alat atau metode untuk mengetahui keseimbangan suatu daerah dalam sektor prasarana yang terdapat di suatu wilayah.

D. Indikator Perkembangan Wilayah

Menurut Rustiadi prinsip utama dalam perkembangan wilayah adalah pengembangan sektor yang paling potensial sebagai sektor penggerak dan diterapkan pada daerah yang tepat sehingga terjadi penjalaran pertumbuhan. Komponen perkembangan wilayah adalah suatu pokok bahasan yang mempunyai peranan dalam pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam menganalisis perkembangan wilayah.

Oleh karena itu, komponen tersebut harus merupakan sesuatu yang akan atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau perkembangan di suatu wilayah. (*Rustiadi, 2011*).



Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dengan menggunakan tiga komponen, sebagai berikut:

1. Kependudukan: jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan aktivitas penduduk
2. Jumlah Fasilitas Umum : sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana ekonomi.
3. Aksesibilitas Wilayah: luas wilayah, jarak ke ibukota kabupaten, ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang, lebar jalan dan kualitas jalan.

1. Indikator Sosial Ekonomi

- Sarana Sosial

Sarana sosial merupakan segala pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau nyata yang meliputi:

1. Sarana pendidikan: TK, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi.
2. Sarana kesehatan: rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, apotik.
3. Sarana peribadatan: masjid, mushola, gereja, pura, wihara, dan Klenteng

Sarana Ekonomi

Sarana ekonomi merupakan segala pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah yang



mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh nyata yang sangat penting dalam memudahkan kegiatan perekonomian guna menunjang percepatan perkembangan dan pertumbuhan wilayah, meliputi pasar, toko kelontong, warung makan, koperasi, industri.

2. Indikator Kependudukan

Indikator kependudukan menjadi salah satu faktor yang penting untuk mengukur tingkat perkembangan suatu wilayah karena dalam tujuan pembangunan suatu wilayah terdapat juga tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah akan mencerminkan kondisi suatu wilayah, jika perkembangan suatu wilayah tersebut baik maka kualitas sumberdaya manusia yang ada di wilayah tersebut juga akan baik, sebaliknya jika perkembangan di wilayah tersebut buruk maka kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut juga akan buruk. Adapun indikator kependudukan dapat diukur melalui :

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan sekumpulan orang banyak yang mendiami suatu tempat atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tentunya tidak mempunyai tingkat kepadatan yang sama.



3. Aktivitas Penduduk

Aktivitas penduduk dalam hal ini mata pencaharian juga mempengaruhi dalam pembentukan pola pikir dan interaksi masyarakat dalam suatu wilayah.

3. Indikator Aksesibilitas Wilayah

Tingkat aksesibilitas wilayah juga dapat diukur berdasarkan pada beberapa variabel yaitu ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang, lebar jalan dan kualitas jalan (*Miro,2004*). Sedangkan menurut dewi dalam jurnalnya mengatakan bahwa variabel aksesibilitas wilayah juga dapat diukur dari luas wilayah, jarak antara Ibukota Kabupaten dan panjangnya jalan diwilayah tersebut (*Dewi, 2013*).

1. Luas Wilayah dan Ketersediaan Jaringan Jalan

Luas wilayah sangat berkaitan erat dengan perkembangan wilayah dan ketersediaan jaringan jalan, sebagaimana diketahui bahwa luas wilayah bersifat tetap (statis), sedangkan manusia dan segala macam kegiatannya senantiasa berkembang dan melakukan mobilitas (dinamis).

2. Kualitas jalan meliputi panjang, lebar dan luas jalan dalam menunjang kelancaran transportasi dan kemudahan aksesibilitas diperlukan adanya prasarana jalan yang memadai. Semakin banyak jalan yang menghubungkan antar daerah maka akan semakin berkembang daerah tersebut.



3. Jarak Ke Ibukota Kabupaten (dalam Km) Jarak masing-masing tiap kecamatan dengan Ibukota Kabupaten akan mempengaruhi tingkat perkembangan di setiap wilayah, dimana jarak yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten biasanya akan lebih mudah mendapat pengaruh kekotaan dan mempengaruhi tingkat ketersediaan jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi di wilayah tersebut.
4. Jumlah Alat Transportasi
Semakin banyak alat transportasi yang tersedia maka aksesibilitas di wilayah tersebut semakin meningkat.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi dan arahan dalam melakukan penelitian yang sama di kota yang berbeda.

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Data	Variabel	Teknik Analisis Data
1	Stevanus Sumadi, Papia Franklin dan Indrajaja	Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kota Tomohon	Data Sekunder	Aksesibilitas Wilayah dan Perkembang an Wilayah	Indeks Alpha, Location Quotient (LQ), Metode Korelasi SPSS



)

2	Alif Fikri Nurhidayani, Prima Jiwa Osly, Irfan Ihsani (2011)	Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Desa di Kecamatan Tambun Selatan Bekasi	Data Sekunder	Aksesibilitas Wilayah dan Perkembangan Wilayah	Indeks Alpha, Analisis Skalogram, Analisis Korelasi
3	Randy Setiawan (2013)	Pengaruh Aksesibilitas dan Karakteristik Sosial Ekonomi terhadap Mobilitas Masyarakat Studi kasus Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Lampung	Data Primer dan Data Sekunder	Hasil wawancara dan kusioner	Analisis dengan SPSS
4	Boris Parlindungan (2010)	Analisis Pengaruh Tingkat Aksesibilitas Wilayah Terhadap Perkembangan Kecamatan di Kota Medan	Data Sekunder	Aksesibilitas wilayah dan perkembangan wilayah	Indeks Alpha, Location Quotient (LQ), Analisis Shift Share
5	La Ode Muhammad Magribi dan Suhardjo (2011)	Aksesibilitas dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan: Konsep Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan di Prov. Sultra	Data Primer dan Data Sekunder	PDRB, Kepadatan Penduduk,	Analisis Korelasi, Analisis Cross Tabulation, Analisis Regresi Sederhana



F. Kerangka Konseptual

